

EKONOMI PANCASILA, EKONOMI KITA¹

Dr. Ir. Arif Budimanta²

Makalah ini akan mendiskusikan mengenai Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antar negara dan warganegara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warganegara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggung jawaban kepada Tuhan yang Maha Esa.

Makalah ini dimulai dengan tampilan data-data dan analisis tentang keadaan ekonomi Indonesia saat ini, anomali yang kita dirasakan dan diakhiri dengan pembahasan mengenai bagaimana seharusnya ekonomi disusun menurut pendiri bangsa dan diakhiri dengan konseptualisasi ekonomi pancasila.

Prawacana

Secara indikator makro ekonomi, Indonesia menunjukkan perubahan yang berarti. Ekonomi kita tumbuh lebih dari 6 persen, kita menjadi anggota G 20, PDB perkapita kita juga saat ini sudah melebihi angka 3000 Dolar AS.

Tetapi persoalannya apakah indikator-indikator optimis tersebut memberikan realitas yang sebenarnya, apakah benar pemerataan pembangunan dirasakan oleh populasi rakyat secara keseluruhan, bagaimana kemajuan ekonomi kita apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Saya akan memberikan beberapa fakta empiris terhadap keadaan perekonomian kita terkini, dilihat dari perspektif yang lain:

1. Kemiskinan. Jumlah orang miskin yang ada di Indonesia, menurut data BPS per Maret 2011, berjumlah 30 juta jiwa atau sekitar 12,49 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau turun sekitar 1 juta jiwa jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada bulan yang sama tahun 2010. Angka itu didapat dengan menghitung jumlah penduduk di perkotaan yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 253 ribuan dan jumlah penduduk di pedesaan yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 233 ribuan (garis kemiskinan BPS 2011).

Tetapi, masyarakat yang hidup di atas angka kemiskinan tersebut juga belum tentu layak disebut tidak miskin apalagi sejahtera. Jumlah masyarakat yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan atau hampir miskin ini cukup besar, mencapai 27,14 juta jiwa atau 11,29 persen (BPS per Maret 2011).

Jika kita memasukkan orang yang tergolong hampir miskin sebagai masyarakat yang hidup tidak sejahtera, maka jumlah masyarakat yang hidup tidak sejahtera selama kurun

¹Revisi Juni 2012. Disampaikan pada Seminar Sistem Perekonomian Nasional menurut pasal 33 UUD 1945. Diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi, Universitas TriSakti. Jakarta 12 Juli 2012

² Anggota DPR/MPR RI, Direktur Eksekutif Megawati Institute

waktu 2010-2011 meningkat. Sebab, terdapat tambahan penduduk yang masuk ke dalam golongan hampir miskin sebanyak 5 juta jiwa jika dibandingkan tahun 2010, dan jika ditelusuri asalnya, tambahan penduduk hampir miskin tersebut yakni berasal dari orang miskin yang naik kelas sebanyak 1 juta jiwa. Sedangkan, 4 juta sisanya berasal dari masyarakat tidak miskin yang penghasilan atau kesejahterannya menurun menjadi hampir miskin, sehingga jika kita melihat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terlihat jelas bahwa kesejahteraan saat ini tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

2. Ketimpangan. Selain kemiskinan, ketimpangan menjadi isu yang marak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Di Indonesia, ketimpangan pembangunan ini terlihat jelas dan terang-terang terjadi. Melihat ketimpangan pembangunan di Indonesia sebetulnya semudah melihat perbedaan yang begitu jauh dari perkembangan yang terjadi di Jakarta dan Papua. Selain ketimpangan pembangunan antar daerah, ketimpangan pendapatan antar penduduk golongan miskin dan golongan kaya di Indonesia juga sangat besar.

Tentu masih hangat pengumuman sebuah majalah mengenai 40 orang terkaya di Indonesia yang jika dijumlahkan hartanya mencapai 10 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang jumlahnya saat ini Rp. 7.396 triliun. Dan bukan berarti sisanya yang 90 persen PDB itu terbagi secara rata kepada seluruh masyarakat. Dari cerita tersebut, jelas ketimpangan yang terjadi di Indonesia ini sudah sangat tinggi karena jika total PDB jika terbagi rata kepada seluruh penduduk (240 juta jiwa), maka per orang akan memiliki pendapatan sebesar lebih dari Rp. 30 juta. Namun, yang terjadi adalah bahwa garis kemiskinan yang hanya sebesar Rp. 250 ribuan per bulan saja tidak dapat dicapai lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia, dan lebih dari 27 juta penduduk memiliki pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan.

Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan di sebuah negara adalah Gini Rasio. Data gini rasio untuk Indonesia yang dikeluarkan BPS memperlihatkan bahwa angka gini rasio cenderung meningkat. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan di Indonesia kian meningkat.

3. Daya saing. Untuk tahun 2011-2012 peringkat daya saing Indonesia menurut WEF berada pada posisi 46, menurun dua tinggakt dari sebelumnya di posisi 44. Peringkat daya saing Indonesia lebih rendah dari Thailand 39, Malaysia 21, Singapura posisi 2.

Daya saing indonesia yang lebih buruk dari tetangga ini diindikatori oleh kesiapan infrastruktur yang buruk, kesehatan dan pendidikan dasar yang lebih rendah kualitasnya (Indonesia 64, Brunei 30, Malaysia 33, Singapura 3), kesiapan teknologi (Indonesia peringkat 94) yang lebih rendah dibanding Malaysia (44), Brunei 57, Singapura 10.

4. Jebakan utang. Total utang pemerintah sampai dengan Juni 2012 sebesar 1.900 Triliun rupiah. Pembayaran bunga utang 5 tahun terakhir meningkat 200 persen dari 65,2 T menjadi 116,4 T pada tahun 2011. Surplus pendapatan negara terhadap belanja negara diluar pembayaran bunga utang yang ditunjukkan oleh ditunjukkan oleh keseimbangan primer lima tahun terakhir menurun 7000 persen, dari 50,791 Triliun menjadi hanya 0,73 Triliun pada tahun 2011.

5. Konflik sosial. Konflik sosial juga akhir-akhir ini marak ditengah masyarakat kita. Mulai dari persoalan perebutan sumber daya, maupun yang terkait dengan persoalan kebebasan beragama. Beberapa daerah ‘mengancam’ memerdekakan diri.

Dari berbagai fakta dan data diatas, maka timbul pertanyaan bagi kita. Apa yang salah dengan model pembangunan kita, paradigma ekonomi kita, apakah sudah sesuai dengan amanat konstitusi negara dan para pendiri bangsa.

Ekonomi Kita Menurut Pendiri Bangsa

Tujuauan ekonomi Indonesia menurut Hatta³ haruslah diarahkan bagaimana menciptakan satu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang memuat dan berisikan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan.

Orang akan merasa hidupnya berbahagia apabila makannya cukup setiap waktu, pakaiannya lengkap sekedarnya, ada rumah tempat kediamannya yang meberikannya cahaya hidup, kesehatannya sekeluarga terjaga, anak-anaknya dapat disekolahkan, ada pula perasaan padanya bahwa ia pada hari tuanya tidak akan terlantar

Kesejahteraan adalah perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya..ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.

Damai yang dimaksud adalah apabila orang benar-benar merasa hidup dalam suasana damai, keluar dan kedalam. Keluar adaperdamaian kalau bangsa Indonesia hidup alam damai dengan bangsa-bangsa asing..kedalam ada perdamaian apabila rasa persaudaraan didup dikalangan rakyat

Kemerdekaan tidak saja mengenai kemerdekaan dari penjajahan, tetapi meliputi juga kemerdekaan manusia pribadi, bebas dari segala penindasan, merdeka mengeluarkan pendapat, merdeka memeluk agama yang disukai, bebas dari rasa takut dan bebas dari kesengsaraan hidup.

Merujuk kepada tujuan ekonomi Indonesia yang dikemukakan oleh Hatta, maka pembangunan ekonomi yang kita capai saat ini masihlah jauh dari harapan. Persoalan mendasar seperti tercapainya perasaan bahagia dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan belumlah terwujud secara paripurna.

Ekonomi Pancasila Ekonomi Kita

Josep E. Stiglitz⁴ (2010) mengatakan problematika sosial suatu negara merupakan cerminan dari paradigma ekonomi yang dianut dari negara tersebut. Masalah ketimpangan,

³Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin (Jakarta; Penerbit Mutiara, 1979)

kemiskinan, minimnya kesempatan kerja, daya saing Indonesia yang lemah, inefisiensi birokrasi, persoalan lingkungan hidup, adalah persoalan keseharian yang kita hadapi setiap hari. Semua itu adalah problem sosial yang kita hadapi bersama pada saat ini.

Persoalannya kemudian bagi kita adalah, bagaimana kita mengatasinya. Kebijakan ekonomi yang selama ini dijalankan ternyata belum bisa membebaskan dan memerdekakan masyarakat dari jebakan kolonialisme ekonomi.

Kita melihat banyak negara yang mengandalkan model pembangunan dengan corak paradigma kapitalis pada akhirnya membawa ketimpangan antar warga yang sangat tajam, membangkrutkan negara pada satu sisi, tetapi negara tersebut tetap memiliki jutawan kelas dunia pada sisi lain.

Kita juga melihat negara-negara yang mengadopsi corak ekonomi yang sosialis pada akhirnya tercerai berai, dan tidak berhasil mengangkat kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan corak yang diyakininya.

Sesungguhnya dari berbagai krisis yang telah kita saksikan di berbagai negara maupun yang kita lewati sendiri, mengandung pelajaran berharga mengenai *arti penting paradigma maupun ideologi dalam membangun bangsa*.

Indonesia terus dapat bertahan dari segala kerapuhan, karena kita memiliki ideologi dan konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibarat rumah, maka ideologi dan konsepsi inilah yang menyangga kehidupan kebangsaan kita menghadapi gempuran zaman. Betapa suatu ideologi, konstitusi, dan rasa sebagai negara kesatuan menjadi semangat tersendiri yang sulit dijelaskan oleh berbagai aliran ekonomi ortodoks seperti kapitalisme, sosialisme, dan lain sebagainya.

Keunikan nilai yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini berdasarkan kondisi masyarakat inilah yang bila dijalankan secara konsisten akan menjadi bentuk paling tepat dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD '45.

Berfokus dalam hal ekonomi, maka paradigma ekonomi seperti apa yang seharusnya dijalankan oleh Indonesia agar kerapuhan ekonomi dapat berbalik arah menjadi kekuatan ekonomi yang berkesinambungan.

Sesuai dengan ideologi yang kita miliki maka menurut saya bangunan ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan semangat ke-Indonesiaan. Ia tidak kapitalis, tidak pula sosialis (lihat tabel perbandingan). Ekonomi Pancasila adalah suatu tandingan ideologis atau ideologi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis.

Sistem ekonomi Pancasila merupakan penjabaran dari semangat Pancasila dalam perekonomian dan kesejahteraan yang bertujuan untuk mengoreksi sistem ekonomi Indonesia berwatak kolonial.

⁴ Joseph E. Stiglitz. Free Fall; Free Markets and The Sinking of The Global Economy. (great Britain, Allen Lane, 2010). Profesor Ilmu Ekonomi, peraih hadiah Nobel Ekonomi 2001.

Perbandingan Paradigma Ekonomi, kapitalisme, Sosialisme dan Pancasila

Paradigma	Kapitalisme	Sosialisme	Pancasila
Komponen			
Relasi	Minim campur tangan negara	Negara memainkan peran utama	Penguasaan negara untuk kemamuran rakyat
Pelaku	Individu/Swasta	Negara, Kolektivisme	Usaha bersama/ Koperasi bercorak gotong royong
Harga	Mekanisme pasar	Dikendalikan negara	Kebutuhan dasar dikendalikan negara

Ekonomi Pancasila digagas tentunya berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa dan pemikiran mengenai ekonomi negara yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta dan pemikir ekonomi sesudahnya. Digagas untuk menjadi ideologi alternatif di antara berbagai ideologi ekonomi yang berkembang di dunia saat ini. Ia tidak (neo)liberal/kapitalis, ia tidak pula sosialis. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi Pancasila yaitu Ekonomi Kita, khas Indonesia.

Dengan menjabarkan Pancasila sebagai ideologi negara, ekonomi Pancasila dibangun untuk menentukan arah yang jelas bagi perekonomian Indonesia. Sehingga, kita tidak lagi disibukkan dengan perdebatan-perdebatan tentang ideologi ekonomi apa yang layak bagi negara kita pada masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Konseptualisasi Ekonomi Pancasila pertama kali dilakukan oleh Emil Salim⁵, tetapi Emil Salim lebih mengedepankan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi Emil Salim tujuan utama bagi ekonomi adalah mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Widjojo Nitisastro juga menyuarakan mengenai Ekonomi Pancasila. Meski ia tidak menuliskan secara langsung Ekonomi Pancasila, tetapi gagasannya dalam membangun perekonomian bangsa berlandaskan Pancasila. Menurutnya, jalan keluar dari kemerosotan ekonomi yang disebabkan penyelewengan di masa lampau yang menyampingkan seluruh prinsip ekonomi hingga saat ini, adalah kembali kepada UUD '45. Ia mengacu kepada Ketetapan MPRS XXIII.⁶ Ketetapan tersebut disusun berdasarkan kepentingan menuju perbaikan ekonomi rakyat. Bahkan, kepentingan ekonomi diutamakan dari kepentingan nasional lain, termasuk politik.

Pendasaran Widjojo pada UUD '45 memberikan penjelasan bahwa ekonomi Indonesia harus memiliki karakter berbeda dibanding yang lain. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia

⁵Emil Salim. Ekonomi Pancasila. Kompas 30 Juni 1966.

⁶ Ketetapan MPRS No. XXIII adalah suatu keputusan politik yang mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala persoalan nasional lain, termasuk politik. Konsekuensi keputusan politik ini ialah bahwa politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Lihat Widjojo Nitisastro, *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 129.

harus disesuaikan dengan kebutuhannya dalam menempuh perjalanan menuju perekonomian sehat.

Dalam pandangannya, setiap bangsa akan diterpa berbagai persoalan nasional. Namun, pemerintah harus berani menetapkan persoalan ekonomi adalah persoalan yang harus diprioritaskan. Karena itu, dibutuhkan sebuah sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Sistem tersebut adalah sistem ekonomi Pancasila.

Pandangan lain disampaikan oleh Mubyarto. Dalam Ekonomi Pancasila, menurut Mubyarto, seluruh sila harus menjadi acuan kebijakan dan perilaku ekonomi seluruh rakyat Indonesia.⁷ Dengan demikian, gagasan ekonomi Pancasila konsisten dengan lima sila yang menjadi dasar negara kita.

Merujuk kepada gagasan yang dikembangkan sebelumnya maka dirumuskan ***Ekonomi Pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antar negara dan warganegara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warganegara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggung jawaban kepada Tuhan yang Maha Esa.***

Atas dasar konseptualisasi yang utuh dan menyeluruh itu, maka operasionalisasi Ekonomi Pancasila yang didasari oleh landasan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, memberikan pendasaran akan pentingnya spirit teistik yang menekankan etika dan moral bangsa dalam perekonomian. Dengan kata lain, perekonomian harus memiliki landasan etis dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Meski Indonesia bukan sebuah negara yang menetapkan agama tertentu sebagai ideologi bangsa, namun nilai-nilai ketuhanan dan spirit keagamaan telah menjadi landasan ideologi kita, Pancasila. Karena itu, ekonomi Pancasila digagas dan dibangun berdasarkan pertimbangan moral dan etika religius. Dengan demikian, ekonomi Pancasila meniscayakan nilai-nilai kebaikan dan kedermawanan, serta hukum sipil yang tegak untuk menindak ketidakadilan.
2. Sila Kedua. Sebagai konsekuensi logis dari sila pertama, sila kedua menekankan *kemanusiaan yang adil dan beradab*. Dalam ekonomi Pancasila, pembangunan ekonomi tidak sebatas mengejar prestasi atau penilaian secara materi. Lebih dari itu, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada keadilan dan peradaban manusia, khususnya bangsa Indonesia. Masalah kemiskinan, kesenjangan sosial yang begitu lebar, dan lain sebagainya harus diatasi untuk menuju keadilan dan kemajuan (per)adab(an) bangsa dalam dimensi kemanusiaan.

Artinya dalam perspektif ini unsur manusia menjadi penting dan pelaku aktif dalam menggerakkan roda perekonomian. Ekonomi Pancasila tidak melakukan pengekanan terhadap kreativitas dan kebebasan individu dalam mencapai peningkatan peradaban secara kolektif.

⁷ Mubyarto, "Kenaikan Harga BBM tak Sejalan dengan Pemikiran Ekonomi Pancasila", dalam Mubyarto (Ed.), *Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional: Mengurai Benang Kusut Subsidi BBM dan Defisit APBN*, cet. I, Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM, 2004, hlm. 10.

3. Sila ketiga, menekankan *persatuan Indonesia*. Ekonomi Pancasila digagas untuk mempersatukan bangsa. Apabila kemudian kebijakan ekonomi justru memudahkan semangat persatuan bangsa maka kebijakan tersebut pastilah bukan bercorak atau bercirikan Ekonomi Pancasila.

Dalam hal ini, usaha bersama/gotong royong menjadi kuncinya. Produksi dan distribusi yang dikerjakan melalui mekanisme usaha bersama/Gotong royong dalam peningkatan ekonomi memperkecil kesenjangan yang berpotensi memecah belah bangsa. Dalam konteks ini, maka kemudian negara mengambil peran strategis untuk melakukan proses distribusi akses sumber daya ke wilayah-wilayah negara sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

4. Sila keempat, *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, menekankan mekanisme kerja perekonomian yang mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu/golongan/modal. Sila tersebut juga menuntut peran aktif dari setiap perusahaan/badan usaha milik negara (BUMN) saat ini untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan akses yang besar kepada masyarakat terhadap kebutuhan dasarnya. Selain itu, sila keempat menekankan demokrasi ekonomi yang digagas Bung Hatta. Di dalam sistem ekonomi yang menjamin demokrasi ekonomi, setiap warga memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan layak (pasal 27 UUD 1945). Dengan kata lain, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak hanya berlaku bagi golongan-golongan tertentu. Tapi, hak tersebut juga berlaku bagi setiap warga Indonesia. Semuanya berhak mendapatkan kesempatan yang sama (*equal opportunity*).⁸

Elinor Ostrom⁹ (1990) mengatakan sumber daya ekonomi dapat dikelola bersama dengan membangun konsensus (musyawarah mufakat) antar pelaku ekonomi. Konsensus dibangun untuk mendapatkan akses yang adil antar pelaku, saling mengawasi, serta saling memberi sanksi atas pelanggaran oleh sesama pelaku yang memanfaatkan sumber daya tersebut.

Dalam hal demokrasi ekonomi, Widjojo juga telah banyak menyinggung soal tersebut. Bahkan, ia menjelaskan dengan baik apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi sebagai berikut:

Menurut Pasal 5 demokrasi ekonomi harus dijamin berlangsungnya dalam sistem ekonomi Indonesia. Apakah demokrasi ekonomi itu? Ini bukanlah istilah baru. Penjelasan UUD 1945 menyatakan: “Dalam Pasal 33 tercantum dasar *demokrasi ekonomi*. Produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang...” dan juga: “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang...”

⁸Prinsip demokrasi ekonomi ini terjelma dalam UUD '45, pasal 23, 27, 33, dan 34. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang hal ini, lihat Emil Salim, *Sistem Ekonomi Pancasila*, Kompas, 30 Juni 1966. Lihat juga Widjojo Nitisastro, *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro*, hlm. 130-131.

⁹Elinor Ostrom. *Governing The Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. 1990. Profesor Ilmu Politik, Peraih Nobel Ekonomi 2009.

Pasal 6 ketetapan MPRS menyebut ciri-ciri positif demokrasi ekonomi. Antara lain dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan (Pasal 33 Ayat (1) UUD 45), dan karenanya *tidak mengenal struktur pertentangan kelas*. Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat, dan karenanya *tidak boleh dijadikan alat untuk mengeksploitasi sesama manusia*. Kepada warga negara diberi kebebasan dalam memilih pekerjaan, sedang potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dalam pada itu sesuai dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.¹⁰

5. Terakhir, sila kelima, *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Sila kelima adalah sila pamungkas. Empat sila lain merupakan tahapan-tahapan untuk mencapai keadilan sosial yang tercatat dalam sila pamungkas tersebut. Dengan prinsip keadilan sosial, ekonomi Pancasila digagas untuk memberikan pemerataan pembangunan dan mendorong terciptanya emansipasi sosial. Dalam konteks ini, spirit teistik atau etika religius yang tercermin di sila pertama, peradaban manusia di sila kedua, persatuan di sila ketiga, dan demokrasi ekonomi/*equal opportunity* di sila keempat disusun untuk menegakkan keadilan. Sebab, keadilan adalah nilai universal kemanusiaan. Dalam konteks ini juga, *equal opportunity* harus mendapatkan perhatian khusus. Setiap warga Indonesia harus mendapatkan kesempatan terbuka menuju kesejahteraan bersama. Konsekuensi logisnya, negara harus melakukan pembagian hasil produksi yang merata di seluruh pelosok negeri.

Berdasarkan pemaparan di atas, Ekonomi Pancasila tentunya disuarakan untuk membangun basis perekonomian bangsa yang berakar dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sayangnya, hal ini belum mendapat perhatian khusus dari para ekonom Indonesia. Mereka cenderung berkuat dalam perdebatan soal ideologi ekonomi dunia yang berkembang saat ini seperti kapitalisme dan sosialisme. Padahal, gagasan ekonomi Pancasila melampaui dua paham tersebut. Meski demikian, setiap gagasan memiliki kelemahan dan kelebihan. Maka, ekonomi Pancasila harus terus disuarakan untuk disempurnakan demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Penutup

Perkembangan ekonomi dunia saat setidaknya membawa keinsyafan bagi kita bahwa kapitalisme saat ini sudah berada di jurang kehancuran, sedangkan pada sisi lain sosialisme juga telah memilih corak kapitalisme.

Rumusan ekonomi pancasila sebagai ideologi alternatif yang operasionalisasi konstitusionalnya dituangkan dalam UUD 1945 hendaknya kemudian kita jadikan landasan ideologi dalam membangun kesejahteraan dan keadilan sosial, karena inilah pilihan jalan lurus bagi kita yang saat ini membangun hampir tanpa pijakan ideologi.

¹⁰ Widjojo Nitisastro, *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo*, hlm. 131-132.